



Berharap Tak Dipandang sebagai Sapi Perah

PHRI DIJ Minta Lebih Diperhatikan

JOGJA, Radar Jogja - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengurangi stimulus pajak dari 30 persen menjadi 25 persen. Terkait dengan itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) berharap lebih diperhatikan. Lantaran pajak yang dibayarnya jadi pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah.

Ketua PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengucap syukur, okupansi sepanjang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode ini tinggi. Bahkan melebihi jumlah capaian pada sebelum pandemi Covid-19.

"Terutama pada 24 Desember dan 31 Desember 2022. Rata-rata okupansi mencapai 95 persen," sebutnya saat dihubungi *Radar Jogja* kemarin (4/1).

Diakui Deddy, itu merupakan berkah. Sebab sepanjang 2,5 tahun sebelumnya anggota PHRI harus berhutang untuk menutup biaya operasional dan perbaikan fasilitas. "Kalau kami kebijakan pemerintah (mengurangi stimulus, Red) yang seperti itu *monggo*," ujarnya.

Tapi Deddy menekankan, pemerintah wajib memperhatikan pelaku usaha hotel dan restoran di DIJ. Dalam hal ini khususnya Kota Jogja.

"Kami memberikan sarana memberi PAD. Kami diperhatikan *dong*. Misal



ELANG KHARISMA DEWANGA/RADAR JOGJA

IKON JOGJA: Wisatawan menikmati suasana kawasan Tugu Jogja, Senin (2/1). Kehadiran para wisatawan ke Jogja pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu turut mendongkrak okupansi hotel.

promosi, kunjungan kerja, maupun lainnya *mbok yo* PHRI Kota Jogja *dijawil* (turut dilibatkan, Red). Maka ada timbal baliknya," jelasnya.

Deddy menyinggung kegiatan Pesparawi 2022 yang masih menyisakan hutang. Sebagian anggota PHRI, kata Deddy, justru dibiarkan pusing sendiri. "Kami sudah bayar pajak. Padahal 100 persen belum diterima (pembayaran sewa, Red). Kami *malah* terbebani karena pemakai belum bayar *full*. Perhatikan kesulitan kami apa. Jangan menjadi sapi perah saja," ketusnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Wasesa menyebut, target 2022 terlampaui. Capaian target pajak bahkan menyentuh 110,9 persen. Ditetapkan Rp 97 miliar, PAD dari pajak daerah mencapai Rp 99,3 miliar pada 31 Desember 2022. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menargetkan PAD sebesar Rp 104 miliar. Berdasar capaian itu, Pemkot Jogja menilai kesanggupan masyarakat. "Stimulus masih ada, tapi kami kurangi. Kalau kemarin 30 persen (dari besaran pajak, Red), sekarang 25 persen," ujarnya.

Pengurangan stimulus, dimungkinkan berpengaruh pada PAD. Oleh sebab itu, Wasesa menetapkan target 2023 yang lebih tinggi. "Target tahun 2023 Rp 104 miliar. Tahun lalu hanya Rp 97 miliar," sebutnya.

Wasesa optimistis, target yang ditetapkannya akan tercapai. Dia bahkan berharap, capaiannya di tahun 2023 dapat kembali melampaui target. Mengingat kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 sudah membaik. "Kebutuhan pembangunan juga semakin meningkat," tandasnya. **(fat/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005